

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latarbelakang

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang. Sebagai negara berkembang, akan terus melakukan upaya pengembangan salah satunya pada bidang Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional (PERMENPAN 15:2008). Dalam hal peningkatan mutu aparatur pemerintah sebagai modal dasar pembangunan nasional, maka kinerja sumber daya manusia senantiasa harus ditingkatkan dan diarahkan agar bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Peningkatan mutu sumber daya manusia yang strategis terhadap keterampilan, motivasi, pengembangan dan manajemen pengorganisasian sumber daya manusia merupakan syarat utama untuk mewujudkan kemampuan bersaing dan kemandirian. Sejalan dengan itu visi dalam konteks pembangunan bidang kepegawaian dimasa yang akan datang adalah mempersiapkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, mampu bersaing dan mampu mengantisipasi perkembangan dunia yang pesat diberbagai aspek kehidupan sehingga mampu meningkatkan mutu pelayanan dan kinerja yang tinggi (Maarif, 2003, h.2).

Di Indonesia telah terdapat beberapa lembaga pemerintahan yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) yang selanjutnya disebut PPK BLU. BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisien dan produktivitas (PP 23 pasal 1:2005).

PPK-BLU adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurut teori agensifikasi, BLU merupakan agen pemerintah yang memperoleh kewenangan yang lebih luas dalam hal manajemen organisasi pengelolaan keuangan maupun dalam hal pelaporan dan akuntabilitas kinerja.

Dalam penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum tentunya membutuhkan elemen pendukung demi tercapainya penerapan pola tersebut. Elemen tersebut adalah SDM (Sumber Daya Manusia) yang berkualitas. Kesadaran akan perlunya seorang pegawai yang berkualitas, perlu ditindak lanjuti dengan berbagai strategi yang dapat meningkatkan kinerja seorang pegawai. Salah satu strategi untuk menghadapi tantangan yang tidak ringan, setiap organisasi harus mendesain kembali perencanaan organisasinya, pengelolaan manajemen kinerja serta pendayagunaan manusia. Dalam hal ini berarti mengupayakan agar sumber daya manusia itu mampu dan mau bekerjasama secara optimal demi tercapainya tujuan organisasi. Kinerja seseorang dapat menjadi optimal jika didukung oleh kemampuan yang baik dan motivasi yang kuat. Keberhasilan kinerja pegawai sebuah organisasi dipengaruhi pula oleh faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja seorang pegawai. Menurut Rothwell (2000, h.6), mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu : data dan informasi, sumber daya, peralatan dan lingkungan, konsekuensi hasil kerja, keahlian dan pengetahuan, kemampuan, motivasi serta insentif dan imbalan.

Pada Perpres No 90 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Perhubungan menjelaskan bahwa dengan dilaksanakannya reformasi birokrasi di lingkungan kementerian perhubungan, maka dalam upaya peningkatan kinerja pegawai di lingkungan kementerian perhubungan perlu diberikan Tunjangan Kinerja.

Tunjangan Kinerja yang termasuk di dalamnya adalah remunerasi. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, perlu berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 73/PMK.5/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 10/PMK.02/2006 Tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Kementrian Perhubungan. Bahwa Menteri Perhubungan melalui surat Nomor: PR 002/3/3 PHB 2014 tanggal 28 Nopember 2014, telah mengajukan usulan penetapan remunerasi untuk Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Kementrian Perhubungan.

Pemberian Tunjangan Remunerasi Pejabat dan Pegawai Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang harus dilakukan dengan baik dan dengan prosedur yang benar oleh setiap fungsi yang terkait, karena menyangkut kesejahteraan dari Pejabat dan Pegawai Badan Layanan Umum dan Sumber Daya Manusia yang dihasilkan oleh Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengulas lebih lanjut tentang Tunjangan Remunerasi Pada Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang dengan judul tugas akhir **“PERHITUNGAN TUNJANGAN REMUNERASI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG”**

1.2 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini akan dibahas mengenai perhitungan remunerasi pegawai negeri sipil Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang mulai dari :

1. Gambaran umum remunerasi pegawai negeri sipil Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.
2. Perhitungan remunerasi pegawai negeri sipil Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.

1.3 Tujuan Penulisan

Dalam Penyusunan tugas akhir ini ada beberapa tujuan yang ingin penulis capai yaitu :

1. Untuk mengetahui pengertian dari tunjangan remunerasi.
2. Untuk mengetahui obyek penerima remunerasi Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.
3. Untuk mengetahui persyaratan bagi penerima remunerasi Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.
4. Untuk mengetahui komponen penilaian dalam remunerasi Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.
5. Untuk memberi gambaran mengenai mekanisme pembayaran remunerasi dan tata cara pengajuan remunerasi Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.
6. Untuk mengetahui metodologi dan pentahapan penyusunan sistem remunerasi Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.
7. Untuk mengetahui perhitungan remunerasi pada Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.

1.4 Kegunaan Penulisan

a. Manfaat Teroritis

Bagi Penulis, hasil penulisan ini memberikan ilmu pengetahuan baru bagi penulis, semakin mendalami ilmu tentang perhitungan tunjangan remunerasi, dan salah satu syarat kelulusan Diploma III Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro.

b. Manfaat Praktik

1. Bagi Almamater, penulisan tugas akhir ini dapat menambah referensi untuk semua pihak universitas yang membutuhkan, selain itu juga menambah pengetahuan tentang Perhitungan Tunjangan Remunerasi.
2. Bagi Pembaca, memperoleh informasi referensi bagi pembaca yang membutuhkan, dan sebagai penambah data bagi pembaca yang melakukan penelitian serupa.
3. Bagi Perusahaan, memperoleh masukan objektif yang dapat dipertanggung jawabkan secara akademis untuk meningkatkan kinerja Instansi, dan sebagai sarana menjalin hubungan yang baik antara instansi dengan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

1.5 Cara Pengumpulan Data

1.5.1 Data Penelitian

Dalam penyusunan tugas akhir membutuhkan data yang lengkap, relevan dan obyektif serta merupakan data yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dengan kata lain, data merupakan kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian dan kesatuan yang nyata. Data merupakan material atau bahan baku yang belum mempunyai makna atau belum berpengaruh langsung kepada pengguna sehingga perlu diolah untuk dihasilkan sesuatu yang

lebih bermakna (Mulyanto,2009:15). Berdasarkan sumbernya data dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu :

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi. Sumber data primer adalah responden individu, kelompok fokus, internet juga dapat menjadi sumber data primer jika koesioner disebarakan melalui internet (Sekaran,2011).

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder adalah catatan Tu dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs Web, internet dan seterusnya (Sekaran,2011).

1.5.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini, penulis akan menggunakan beberapa metode penelitian untuk mendapatkan data yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam karya tulis ini, yaitu :

a. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti (Sugiyono,2012).

b. Pengamatan (Observasi)

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan fakta atau data (*fact finding technique*) yang cukup efektif untuk mempelajari suatu system. Observasi adalah pengamatan langsung suatu kegiatan yang sedang dilakukan (Jogiyanto,2005:623). Dalam metode ini penulis akan melakukan pengamatan secara langsung

kegiatan perhitungan remunerasi pegawai Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.

c. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong,2009:186). Dalam metode ini penulis akan mengumpulkan data dengan cara mewawancarai pihak yang terkait mengenai obyek yang diteliti khususnya pada subbag keuangan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dan penyusunan Tugas Akhir ini maka diperlukan penyusunan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan latar belakang, ruang lingkup penulisan, tujuan dan kegunaan penulisan, cara pengumpulan data, serta sistematika penulisan yang digunakan penulis untuk menyusun Tugas Akhir ini.

BAB 2 GAMBARAN UMUM INSTANSI

Dalam bab ini akan dijelaskan gambaran umum Kementerian Perhubungan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang yang terdiri dari sejarah singkat, visi dan misi, wilayah kerja, kedudukan, tugas pokok, dan fungsi kedudukan, struktur organisasi, serta uraian tugas Kementerian Perhubungan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.

BAB 3 PEMBAHASAN TEORI DAN PRAKTIK

Dalam bab ini akan diuraikan mekanisme penghapusan barang milik daerah yang diterapkan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen dan mngevaluasinya berdasarkan dengan landasan hukum serta peraturan yang berlaku, beserta dengan teori-teori pendukungnya

BAB 4 PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan simpulan dan saran dari pembahasan yang telah dipaparkan pada bab III mengenai Evaluasi Mekanisme Penghapusan Barang Milik Daerah dari Kartu Inventaris Barang pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.